

ABSTRAK

Konflik sosial yang melibatkan aliran Syi'ah dan Sunni di Kabupaten Sampang telah menjadi perhatian dalam konteks kerukunan beragama di Indonesia. Konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan konsep ataupun praktek yang dianut dan dijalankan oleh pemeluk agama yang di percayainya, hingga mengalami pengusiran dari tempat tinggal oleh aliran Sunni dan kehilangan tempat beribadah. Konflik tersebut terjadi di desa Karang Gayam dan desa Blu'uran. Konflik yang memiliki akar yang kompleks melibatkan faktor-faktor agama, sosial, ekonomi dan politik mengakibatkan munculnya perbedaan interpretasi dan diskriminasi yang berujung penolakan, hingga menjadikan trauma bagi kelompok yang menjadi konflik. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Sampang dalam pemenuhan hak tempat ibadah serta kendala dan hambatan dalam pemenuhan tempat ibadah tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode empiris, dengan melalui pendekatan Sosiologi hukum yang didasarkan pada pikiran hukum sebagai cara pengarah sosial yang menggunakan gaya empiris. Kemudian digabungkan dengan wawancara dan kajian Undang-Undang serta kepustakaan. Upaya pemerintah Kabupaten Sampang untuk memenuhi tempat ibadah telah dilakukan secara maksimal, baik dalam bantuan primer bahkan sampai pendidikan. Namun, warga Sampang sebagai mantan penganut Syi'ah yang telah dipulangkan ke Kabupaten Sampang masih belum optimal, ini dibuktikan dengan kurang aman dan nyaman dalam melakukan ibadahnya. Sehingga mantan penganut syiah perlu memiliki tempat ibadah khusus bagi para mantan penganut Syi'ah. Namun, terdapat kendala yaitu terkendala di persyaratan administratif dan penolakan terhadap mantan penganut Syi'ah.

Kata kunci: Konflik Sosial, Sunni-Syi'ah, Hak Beribadah

ABSTRACT

The social conflict involving Shia and Sunni sects in Sampang Regency has drawn attention in the context of religious harmony in Indonesia. The conflict arose from differences in concepts and practices embraced and practiced by adherents of the respective religions. This led to the expulsion of Sunni believers from their homes and the loss of their places of worship. The conflict occurred in Karang Gayam and Blu'uran villages. The conflict, with its complex roots involving religious, social, economic, and political factors, resulted in differing interpretations and discrimination, leading to rejection and trauma for the groups involved. Therefore, this study was conducted to determine the efforts of the Sampang Regency Government in fulfilling the right to places of worship, as well as the obstacles and barriers in fulfilling these places of worship. The research method used is an empirical method, using a sociological approach based on legal thought as a means of social direction that uses an empirical style. Then combined with interviews and legal and literature studies. The Sampang Regency Government's efforts to fulfill places of worship have been carried out optimally, both in primary assistance and even education. However, Sampang residents, former Shia adherents who have been repatriated to Sampang Regency, are still not feeling optimal, as evidenced by the lack of safety and comfort in practicing their religious practices. Therefore, a dedicated place of worship is needed for former Shia adherents. However, challenges include administrative requirements and rejection of former Shia adherents.

Keywords: Social Conflict, Sunni-Shia, Right to Worship